STRATEGI PEMULIHAN PASCABENCANA BANJIR DI LAPAS KELAS IIB KUALASIMPANG: ANALISIS BERDASARKAN SENDAI FRAMEWORK

Julfikar
Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
fikar0499@gmail.com

ABSTRACT

Floods can disrupt the implementation of correctional functions, including security and order, health services, administration, and inmate development programs. This study aims to analyze the post-flood disaster recovery strategy at the Class IIB Kualasimpang Correctional Institution from the perspective of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and to identify the obstacles to its implementation. This descriptive qualitative study collected data through semi-structured interviews, observation, and documentation. Six informants represented leadership, security, security and order administration, inmate care, and work activities. Interviews were conducted on 13, 14, and 16 July 2026. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The results show that the recovery strategy was carried out in a gradual, adaptive, and coordinated manner to restore correctional functions. Recovery priorities included facilities and infrastructure, security, health services, administration, operations, and inmate development. The implementation of the strategy is linked to Siagian's strategy dimensions and to the stages of the Post-Disaster Flood SOP in the disaster management guidelines for the correctional system. From the Sendai Framework perspective, the recovery efforts reflect the application of governance and the Build Back Better principle, but risk assessment, preparedness, and long-term resilience still need to be strengthened. The main obstacles include limited facilities and infrastructure, equipment, budget and procurement processes, human resources, and preparedness mechanisms. This study highlights the importance of integrating operational recovery with disaster risk reduction so that correctional institutions not only resume functioning but are also better prepared for future disasters.

Keywords: *recovery strategy, flood, correctional institution, Sendai Framework, disaster preparedness*

ABSTRAK

Bencana banjir dapat mengganggu penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, termasuk keamanan dan ketertiban, pelayanan kesehatan, administrasi, serta kegiatan pembinaan warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemulihan pascabencana banjir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang dalam perspektif *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah enam orang yang berasal dari unsur pimpinan, pengamanan,

administrasi keamanan dan ketertiban, perawatan, serta kegiatan kerja. Wawancara dilaksanakan pada 13, 14, dan 16 Juli 2026. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemulihan dilaksanakan secara bertahap, adaptif, dan terkoordinasi untuk mengembalikan fungsi pemasyarakatan. Prioritas pemulihan meliputi sarana dan prasarana, keamanan, pelayanan kesehatan, administrasi, operasional, dan pembinaan warga binaan. Pelaksanaan strategi menunjukkan keterkaitan dengan dimensi strategi Siagian dan tahapan SOP Banjir Pascabencana dalam pedoman penanggulangan bencana di lingkungan Pemasyarakatan. Dalam perspektif Sendai Framework, upaya pemulihan memperlihatkan penerapan tata kelola dan prinsip *Build Back Better*, tetapi penguatan kajian risiko, kesiapsiagaan, serta ketahanan jangka panjang masih diperlukan. Hambatan utama mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, peralatan, anggaran dan proses pengadaan, sumber daya manusia, serta mekanisme kesiapsiagaan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan pemulihan operasional dengan pengurangan risiko bencana agar lembaga pemasyarakatan tidak hanya kembali berfungsi, tetapi juga lebih siap menghadapi bencana berikutnya.

Kata Kunci: strategi pemulihan, banjir, lembaga pemasyarakatan, Sendai Framework, kesiapsiagaan bencana

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk bencana hidrometeorologi seperti banjir. Dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik dan fungsi kelembagaan. Salah satu institusi yang menghadapi tantangan khusus ketika terjadi bencana adalah lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan harus tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, administrasi, serta pembinaan warga binaan meskipun sarana dan prasarana mengalami gangguan (Dewi, 2025).

Banjir yang berdampak pada Lapas Kelas IIB Kualasimpang menimbulkan kebutuhan pemulihan yang tidak terbatas pada perbaikan fisik bangunan. Pemulihan juga berkaitan dengan pengembalian fungsi operasional, penyediaan layanan, pemulihan sarana pengamanan dan pembinaan, serta penyesuaian pelaksanaan tugas petugas. Dengan karakteristik tersebut, pemulihan pascabencana di lembaga pemasyarakatan membutuhkan strategi yang terarah, terkoordinasi, dan disesuaikan

dengan kondisi sumber daya yang tersedia.

Strategi dalam konteks organisasi diperlukan untuk menetapkan tujuan, menentukan langkah pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil yang dicapai. Penelitian ini menggunakan teori strategi Siagian dengan tiga dimensi analisis, yaitu tujuan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk memahami bagaimana tujuan pemulihan ditetapkan, bagaimana langkah pemulihan dilaksanakan, serta bagaimana proses pemulihan dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan (Siagian, 1995).

Analisis strategi tersebut dilengkapi dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. Kerangka ini memuat empat prioritas, yaitu memahami risiko bencana; memperkuat tata kelola risiko bencana; berinvestasi dalam pengurangan risiko untuk ketahanan; serta meningkatkan kesiapsiagaan dan menerapkan prinsip *Build Back Better* dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai apakah pemulihan hanya berorientasi pada pengembalian fungsi atau juga memperkuat kesiapan lembaga menghadapi risiko bencana pada masa mendatang (UNDRR, 2023).

Kajian terdahulu mengenai tata kelola risiko bencana menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan koordinasi dalam membangun ketangguhan (Tun & Lassa, 2023). Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menelaah proses pemulihan pada institusi pemasyarakatan yang memiliki kebutuhan khusus terkait keamanan, pelayanan, dan pembinaan warga binaan.

Selain kedua landasan tersebut, penelitian ini membandingkan temuan lapangan dengan pedoman penanggulangan bencana di lingkungan Pemasyarakatan, khususnya Lampiran 19 mengenai SOP Banjir (Pasca Bencana). Perbandingan tersebut diperlukan untuk melihat keterkaitan antara strategi yang dilaksanakan di lapangan dan tahapan pemulihan yang ditetapkan dalam pedoman operasional (Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, 2019).

Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemulihan

pascabencana banjir di Lapas Kelas IIB Kualasimpang berdasarkan teori strategi Siagian, menelaah kesesuaiannya dengan prioritas Sendai Framework dan SOP Banjir Pascabencana, serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi pelaksanaan pemulihan. Kajian ini diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai kebutuhan pemulihan pada institusi pemasyarakatan dan menjadi bahan pertimbangan bagi penguatan kesiapsiagaan serta prosedur pemulihan bencana di tingkat satuan kerja.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih untuk menggambarkan strategi pemulihan pascabencana banjir berdasarkan pengalaman informan, kondisi lapangan, dan dokumen yang berkaitan dengan proses pemulihan di Lapas Kelas IIB Kualasimpang (Creswell, 2007).

Penelitian dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Informan ditentukan berdasarkan pengetahuan, kedudukan, serta keterlibatan mereka dalam pelaksanaan tugas dan proses pemulihan pascabencana. Jumlah informan sebanyak enam orang, yaitu Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kepala Sub Seksi Perawatan, Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja, serta Komandan Regu Pengamanan. Wawancara dilakukan pada 13, 14, dan 16 Juli 2026 sesuai dengan tugas dan kedudukan masing-masing informan.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai tujuan, pelaksanaan, evaluasi, dan hambatan pemulihan. Kedua, observasi untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan proses pemulihan di lingkungan Lapas. Ketiga, dokumentasi untuk memeriksa informasi pendukung terkait kondisi sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan pemulihan.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi atau reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Informasi dari wawancara

dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi untuk menemukan kesesuaian maupun perbedaan data. Selanjutnya, temuan dianalisis berdasarkan tiga dimensi strategi Siagian, empat prioritas Sendai Framework, dan tahapan SOP Banjir Pascabencana. Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi kelancaran dan optimalisasi pemulihan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Strategi Pemulihan Pascabencana Banjir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemulihan di Lapas Kelas IIB Kualasimpang dilaksanakan secara bertahap, adaptif, dan terkoordinasi. Pemulihan diarahkan untuk mengembalikan fungsi pemasyarakatan setelah banjir mengganggu kondisi sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan operasional. Langkah pemulihan tidak hanya mencakup pembenahan kondisi fisik, tetapi juga pemulihan keamanan dan ketertiban, pelayanan kesehatan, administrasi, serta kegiatan pembinaan warga binaan.

Pemulihan sarana dan prasarana menjadi salah satu prioritas karena kondisi fasilitas memengaruhi kemampuan Lapas untuk melaksanakan fungsi kelembagaannya. Kerusakan dan keterbatasan peralatan berdampak pada sejumlah bidang, termasuk pengamanan, pelayanan, administrasi, serta kegiatan kerja dan pembinaan. Oleh karena itu, pemulihan dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, kondisi sarana yang masih dapat digunakan, dan ketersediaan sumber daya.

Pada aspek keamanan dan operasional, pemulihan dilakukan dengan menyesuaikan pelaksanaan tugas terhadap kondisi yang tersedia. Koordinasi antarbagian dan dukungan pihak terkait menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan fungsi Lapas selama proses pemulihan. Di samping itu, pelayanan kesehatan, administrasi, dan pembinaan juga memerlukan penyesuaian agar kebutuhan warga binaan tetap diperhatikan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan bukan proses yang berlangsung sekaligus. Pemulihan dilakukan secara bertahap mengikuti kebutuhan prioritas dan kemampuan organisasi. Pola adaptif diperlukan

karena kondisi pascabencana dapat berubah seiring dengan proses pembersihan, pemeriksaan kerusakan, pemenuhan kebutuhan, dan pemulihan fasilitas.

2. Analisis Berdasarkan Teori Strategi Siagian

a. Tujuan strategi

Tujuan strategi pemulihan adalah mengembalikan kemampuan Lapas Kelas IIB Kualasimpang dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan. Tujuan tersebut mencakup pemulihan sarana dan prasarana, keberlangsungan keamanan dan ketertiban, pelayanan kesehatan, administrasi, operasional, serta kegiatan pembinaan warga binaan.

Tujuan pemulihan menunjukkan bahwa keberhasilan tidak cukup diukur melalui perbaikan fasilitas secara fisik. Pemulihan juga perlu memperhatikan kemampuan setiap bidang untuk kembali melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan. Dengan demikian, pemulihan fungsi kelembagaan menjadi orientasi utama strategi pascabencana.

b. Pelaksanaan strategi

Pelaksanaan strategi berlangsung secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Langkah pemulihan meliputi pembersihan dan pemulihan kondisi dasar, pemenuhan kebutuhan pelayanan, inventarisasi kerusakan, rehabilitasi sarana dan prasarana, pemulihan keamanan dan operasional, serta pemantauan dan evaluasi.

Koordinasi internal dan eksternal membantu pelaksanaan langkah-langkah tersebut. Ketika sarana atau peralatan belum dapat dipenuhi sepenuhnya, Lapas memanfaatkan fasilitas yang masih tersedia, meningkatkan pengawasan, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan menyesuaikan kegiatan yang masih memungkinkan untuk dijalankan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan strategi dipengaruhi oleh kemampuan organisasi menyesuaikan tindakan dengan kondisi dan sumber daya yang tersedia.

c. Evaluasi strategi

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui perkembangan pemulihan, mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, dan menentukan langkah lanjutan. Dalam penelitian ini, koordinasi dan evaluasi dengan pihak internal maupun eksternal menjadi faktor yang mendukung proses pemulihan.

Evaluasi juga penting untuk membedakan pemulihan jangka pendek dan penguatan kesiapsiagaan jangka panjang. Apabila evaluasi hanya berorientasi pada pengembalian fungsi operasional, peluang untuk memperbaiki prosedur, kapasitas petugas, dan kesiapan menghadapi banjir berikutnya dapat terlewatkan. Karena itu, evaluasi perlu menghubungkan hasil pemulihan dengan pembelajaran terhadap risiko dan kebutuhan penguatan ketahanan kelembagaan.

3. Analisis dalam Perspektif Sendai Framework

a. Memahami risiko bencana

Prioritas pertama Sendai Framework menekankan pentingnya pemahaman terhadap risiko bencana. Dalam konteks Lapas Kelas IIB Kualasimpang, pemulihan setelah banjir memperlihatkan kebutuhan untuk memahami dampak bencana terhadap sarana dan prasarana, pengamanan, pelayanan, administrasi, serta kegiatan pembinaan.

Inventarisasi kerusakan dan identifikasi kebutuhan menjadi bagian penting dalam menentukan urutan pemulihan. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan perlunya penguatan kajian risiko dan kesiapsiagaan agar pengalaman pemulihan tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga menjadi dasar untuk mengantisipasi gangguan serupa pada masa mendatang.

b. Memperkuat tata kelola risiko bencana

Pelaksanaan pemulihan memerlukan koordinasi antara unsur internal Lapas dan pihak eksternal yang terlibat. Koordinasi membantu penyelarasan kebutuhan, pembagian tugas, pemenuhan sumber daya, serta penyesuaian pelaksanaan fungsi pemasyarakatan.

Dalam perspektif Sendai Framework, koordinasi tersebut berkaitan dengan tata kelola risiko bencana. Pemulihan memerlukan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang berjalan, dan pengambilan keputusan yang menyesuaikan kebutuhan lapangan. Meskipun koordinasi telah mendukung proses pemulihan, mekanisme kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat tetap perlu diperkuat agar tata kelola tidak hanya efektif setelah bencana terjadi.

c. Berinvestasi untuk ketahanan

Keterbatasan sarana dan prasarana, peralatan, anggaran, proses pengadaan, serta sumber daya manusia menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan pemulihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik untuk memperbaiki kerusakan maupun untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana berikutnya.

Investasi untuk ketahanan tidak hanya berkaitan dengan pengadaan atau penggantian fasilitas. Investasi juga mencakup kesiapan peralatan tanggap darurat, peningkatan kapasitas petugas, dan penguatan mekanisme operasional. Oleh karena itu, dukungan sumber daya perlu diarahkan agar hasil pemulihan dapat memperkuat ketahanan Lapas, bukan sekadar mengembalikan kondisi sebelum bencana.

d. Kesiapsiagaan dan prinsip *Build Back Better*

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemulihan telah berorientasi pada pengembalian fungsi pemasyarakatan dan menunjukkan penerapan prinsip *Build Back Better*. Meskipun demikian, penguatan kesiapsiagaan dan ketahanan jangka panjang masih diperlukan.

Salah satu informan menekankan perlunya dasar yang lebih jelas untuk menentukan evakuasi warga binaan: “Menurut saya perlu adanya aturan atau regulasi yang lebih jelas bagi petugas ketika menghadapi langkah-langkah banjir, terutama mengenai kondisi kapan warga binaan harus dievakuasi atau dipindahkan.” (Informan 6).

Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan prosedur operasional yang adaptif terhadap banjir, simulasi berkala, peningkatan kapasitas petugas, penetapan mekanisme evakuasi yang jelas, serta penguatan sistem komunikasi dan koordinasi dalam keadaan darurat. Usulan ini merupakan arah penguatan yang sejalan dengan kebutuhan yang ditemukan dalam penelitian, bukan pernyataan bahwa seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan.

Dengan demikian, penerapan Sendai Framework di Lapas Kelas IIB Kualasimpang memperlihatkan kemajuan pada aspek pemulihan dan tata kelola, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek kesiapsiagaan, investasi ketahanan,

dan pembelajaran risiko untuk jangka panjang.

4. Kesesuaian dengan SOP Banjir Pascabencana di Lingkungan Pemasyarakatan

Penelitian membandingkan temuan lapangan dengan pedoman penanggulangan bencana di lingkungan Pemasyarakatan, khususnya Lampiran 19 tentang SOP Banjir (Pasca Bencana). Perbandingan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara langkah pemulihan yang dilaksanakan dan tahapan yang ditetapkan dalam pedoman operasional.

Secara umum, hasil analisis skripsi menunjukkan bahwa sebagian besar tahapan pemulihan yang ditetapkan dalam SOP telah ditemukan dalam pelaksanaan di Lapas Kelas IIB Kualasimpang. Keselarasan tersebut terlihat pada upaya pemulihan kondisi dasar, pemenuhan kebutuhan layanan, inventarisasi kerusakan, rehabilitasi sarana dan prasarana, pemulihan keamanan dan operasional, serta pemantauan dan evaluasi.

Namun, kesesuaian tahapan tidak berarti bahwa seluruh hasil pemulihan telah optimal. Tingkat kerusakan, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan pengadaan menyebabkan pelaksanaan pemulihan berlangsung secara bertahap. Karena itu, penilaian terhadap SOP perlu mempertimbangkan bukan hanya keberadaan langkah pemulihan, melainkan juga kemampuan sumber daya dan kesiapan organisasi untuk menjalankannya.

Tabel 1 Perbandingan Tahapan SOP Banjir Pascabencana dengan Temuan Penelitian

Tahapan SOP Banjir Pascabencana	Temuan Penelitian	Penilaian
Pembersihan lokasi dan pemeriksaan kesehatan	Pembersihan dilakukan secara masif; pemeriksaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dilakukan bertahap.	Sesuai
Pemeriksaan instalasi listrik	Data spesifik mengenai pemeriksaan instalasi listrik belum memadai.	Belum dapat dipastikan
Pemenuhan layanan dasar dan kesehatan	Bantuan pangan, air, obat-obatan, dan pemulihan layanan kesehatan dilakukan.	Sesuai
Inventarisasi sarana dan prasarana	Inventarisasi kerusakan, pemilahan barang, dan pemeriksaan fasilitas dilakukan.	Sesuai
Rehabilitasi dan perbaikan sarana prasarana	Pembersihan, rehabilitasi, perbaikan fasilitas, dan pemulihan tugas-fungsi dilakukan bertahap.	Sesuai, tetapi bertahap
Pelaporan perkembangan kepada Kanwil	Laporan perkembangan pemulihan disampaikan kepada Kanwil.	Sesuai
Monitoring dan evaluasi	Monitoring, koordinasi, dan evaluasi perkembangan pemulihan dilakukan.	Sesuai

Sumber: diolah dari tabel perbandingan SOP dalam skripsi Julfikar (2026)

Dalam konteks tersebut, SOP berfungsi sebagai pedoman operasional, teori strategi Siagian membantu menganalisis tujuan, pelaksanaan, dan evaluasi, sedangkan Sendai Framework memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pengurangan risiko dan ketahanan jangka panjang. Ketiganya saling melengkapi untuk memahami strategi pemulihan pascabencana di lingkungan Lapas.

5. Hambatan Pelaksanaan Strategi Pemulihan

Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, peralatan pengamanan dan pembinaan, anggaran dan proses pengadaan, sumber daya manusia, serta kesiapsiagaan dan mekanisme penanganan keadaan darurat.

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan dominan karena dampak banjir memengaruhi beberapa bidang sekaligus, termasuk administrasi, pelayanan kesehatan, pengamanan, serta kegiatan kerja dan pembinaan. Pemenuhan kembali sarana dan peralatan tidak selalu dapat dilakukan secara langsung karena berkaitan dengan inventarisasi kerusakan, proses penghapusan barang, pengadaan, dan ketersediaan anggaran.

Hambatan sumber daya manusia dan kesiapsiagaan juga

memengaruhi kemampuan organisasi untuk menjalankan pemulihan dan mempersiapkan diri terhadap keadaan darurat. Dalam kondisi tersebut, Lapas melakukan penyesuaian melalui pemanfaatan sarana yang masih tersedia, peningkatan pengawasan, koordinasi dengan pihak terkait, dan penyesuaian kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Ditinjau dari teori strategi Siagian, hambatan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya, pelaksanaan yang adaptif, dan evaluasi berkelanjutan. Dalam perspektif Sendai Framework, hambatan memperlihatkan perlunya penguatan investasi untuk ketahanan, kajian risiko, dan kesiapsiagaan. Sementara itu, dari sisi SOP Banjir Pascabencana, tahapan pemulihan telah menjadi pedoman pelaksanaan, tetapi keterbatasan sumber daya memengaruhi kecepatan dan optimalisasi hasilnya.

Dengan demikian, hambatan pemulihan tidak menunjukkan ketiadaan upaya pemulihan, melainkan keterbatasan kapasitas untuk mengembalikan seluruh fungsi secara optimal dan membangun ketahanan jangka panjang. Penanganan hambatan perlu diarahkan pada dukungan sarana dan prasarana, ketersediaan peralatan, kapasitas petugas, mekanisme pengadaan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

6. Sintesis Strategi Pemulihan Pascabencana Banjir

Berdasarkan analisis teori strategi Siagian, Sendai Framework, dan SOP Banjir Pascabencana, strategi pemulihan di Lapas Kelas IIB Kualasimpang dapat dirumuskan sebagai strategi pemulihan bertahap, adaptif, dan terkoordinasi yang berorientasi pada pengembalian fungsi pemasyarakatan sekaligus penguatan ketahanan terhadap risiko bencana.

Strategi tersebut mencakup pemulihan kondisi dasar, pemenuhan kebutuhan layanan dan kesehatan, inventarisasi kerusakan, rehabilitasi sarana dan prasarana, pemulihan keamanan dan operasional, serta pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaannya perlu disertai penguatan kajian risiko, prosedur keadaan darurat, kapasitas petugas, komunikasi, koordinasi, dan dukungan sumber daya.

Sintesis ini memperlihatkan bahwa pemulihan operasional dan

pengurangan risiko bencana tidak seharusnya dipisahkan. Pemulihan yang hanya berfokus pada pengembalian fungsi dapat mengatasi kebutuhan mendesak, tetapi belum tentu cukup untuk memperkuat ketahanan pada masa mendatang. Sebaliknya, pemulihan yang mengintegrasikan evaluasi dan pembelajaran risiko dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kesiapsiagaan dan prosedur penanganan bencana di lingkungan Pemasyarakatan.

D. Kesimpulan

Strategi pemulihan pascabencana banjir di Lapas Kelas IIB Kualasimpang dilaksanakan secara bertahap, adaptif, dan terkoordinasi untuk mengembalikan fungsi pemasyarakatan. Prioritas pemulihan meliputi sarana dan prasarana, keamanan dan ketertiban, pelayanan kesehatan, administrasi, operasional, serta kegiatan pembinaan warga binaan. Koordinasi dan evaluasi dengan pihak internal maupun eksternal berperan dalam mendukung pelaksanaan pemulihan.

Berdasarkan teori strategi Siagian, strategi pemulihan dapat dianalisis melalui tujuan pemulihan, pelaksanaan langkah-langkah pemulihan, serta evaluasi terhadap perkembangan dan kebutuhan lanjutan. Dalam perspektif Sendai Framework, pelaksanaan pemulihan memperlihatkan keterkaitan dengan tata kelola risiko dan prinsip *Build Back Better*. Perbandingan dengan SOP Banjir Pascabencana juga menunjukkan bahwa sebagian besar tahapan pedoman telah ditemukan dalam praktik pemulihan.

Meskipun demikian, pemulihan belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, peralatan, anggaran dan proses pengadaan, sumber daya manusia, serta kesiapsiagaan dan mekanisme penanganan keadaan darurat. Oleh karena itu, penguatan kajian risiko, kesiapsiagaan petugas, prosedur operasional, komunikasi, koordinasi, dan dukungan sumber daya perlu menjadi bagian dari strategi pemulihan berikutnya. Penguatan tersebut penting agar pemulihan tidak hanya mengembalikan fungsi Lapas, tetapi juga meningkatkan ketahanan lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi bencana serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry & research design*. Sage Publications, Inc.

Dewi, S. R. (2025). Catatan bencana alam di Indonesia pada 2025, banjir mendominasi. *GoodStats*. https://goodstats.id/article/catatan-bencana-alam-di-indonesia-pada-2025-banjir-mendominasi-eg5hd

Siagian, S. P. (1995). *Manajemen stratejik*.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-57.OT.02.02. (2019).

Tun, T., & Lassa, J. A. (2023). Governing disaster risk in Myanmar: Institutions and policy pathways during 1885–2015. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 96*(February), 103992. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103992

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2023). *The report of the midterm review of the implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*. UN Office for Disaster Risk Reduction. http://www.undrr.org/quick/77288